

TRANSFORMASI SOCIAL SCIENCES PADA KURIKULUM NASIONAL (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)

Rahmat Sudrajat¹, Dyah Kumalasari^{2*}

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

² S2 Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

e-mail: rahmatsudrajat2023@gmail.com

* Correspondence

Abstract

Keywords:

Nasional
Curriculum, Social
Sciences,
Transformation.

The development of Social Sciences (IPS) subjects in the national curriculum has undergone a significant transformation over time. At first, social studies teaching was based more on a traditional approach that focused on rote memorization of historical facts and geography. However, with the development of a more progressive educational approach, social studies underwent changes that included an interdisciplinary approach, the use of information technology, contextual teaching, and the empowerment of student skills. Changes in social studies teaching reflect the evolution of views on social science and educational goals. Thus, these subjects no longer only focus on factual knowledge, but also introduce the social, economic, and political principles underlying social phenomena. Social studies aim to develop an in-depth understanding of the complexities of society and equip students with the critical thinking skills necessary to participate in modern society. The development of social studies also reflects changes in the issues emphasized in learning. Newer national curricula pay more attention to global issues such as climate change, international trade, and human rights. Social studies teach students about the social and environmental impacts of social policies and phenomena and encourage them to participate in positive social change. This research is descriptive qualitative research that explains how the transformation from time to time in Social sciences in the national curriculum. The results achieved in this study constitute the history of the development of social sciences.

Kata kunci:

Transformasi, Ilmu
Pengetahuan
Sosial, Kurikulum
nasional.

Perkembangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam kurikulum nasional telah mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, pengajaran IPS lebih didasarkan pada pendekatan tradisional yang berfokus pada hafalan fakta-fakta sejarah dan geografi. Namun, dengan perkembangan pendekatan pendidikan yang lebih progresif, IPS mengalami perubahan yang mencakup pendekatan interdisipliner, penggunaan teknologi informasi, pengajaran kontekstual, dan pemberdayaan keterampilan siswa. Perubahan dalam pengajaran IPS mencerminkan evolusi pandangan tentang ilmu sosial dan tujuan pendidikan. Sehingga, mata pelajaran ini tidak lagi hanya memfokuskan pada

pengetahuan faktual semata, akan tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari fenomena sosial. IPS bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas masyarakat dan membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Perkembangan IPS juga mencerminkan perubahan dalam isu-isu yang ditekankan dalam pembelajaran. Kurikulum nasional yang lebih baru memberikan perhatian lebih pada isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia. IPS mengajarkan siswa tentang dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan dan fenomena sosial, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan bagaimana transformasi dari masa ke masa Ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum nasional. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini merupakan sejarah perkembangan Ilmu pengetahuan sosial.

A. Pendahuluan

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurikulum nasional seiring berjalannya waktu. Sejak pendirian sistem pendidikan formal di banyak negara, termasuk Indonesia, IPS telah menjadi komponen penting dalam upaya membekali siswa dengan pemahaman tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat.

Pada awalnya, pendekatan dalam pengajaran IPS cenderung lebih tradisional dan berfokus pada hafalan fakta-fakta sejarah serta geografi. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan pendekatan pendidikan yang lebih progresif, dengan demikian mata pelajaran IPS mengalami transformasi yang signifikan.

Salah satu perubahan penting dalam perkembangan IPS adalah pengenalan pendekatan interdisipliner. Pada kurikulum nasional terkini, IPS tidak lagi diajarkan secara terpisah, akan tetapi diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sains. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep-konsep IPS dengan aspek-aspek kehidupan nyata dan memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada siswa.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak besar pada pengajaran IPS. Di era digital ini, siswa dapat mengakses sumber daya dan informasi secara luas dan mudah, yang memungkinkan mereka untuk memperluas wawasan mereka tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Selanjutnya, perkembangan IPS juga mencakup perluasan ruang lingkup materi pembelajaran. Dalam kurikulum nasional terbaru, isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia menjadi komponen penting dalam pembelajaran IPS. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang sadar secara global dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di tingkat internasional.

Perkembangan IPS juga melibatkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Guru-guru IPS kini lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan berargumentasi.

Pembelajaran IPS tidak lagi terbatas pada pembacaan buku teks dan pelajaran di dalam kelas, melainkan juga melibatkan kegiatan lapangan, observasi, wawancara, *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)*

dan penggunaan sumber daya lokal untuk memperdalam pemahaman siswa. Perkembangan IPS dalam kurikulum nasional juga mencerminkan evolusi pandangan dan pemahaman tentang ilmu sosial itu sendiri. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus pada fakta-fakta sejarah dan geografi, tetapi juga mengajarkan siswa untuk memahami prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari fenomena sosial. IPS memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik, ekonomi, dan sosial berinteraksi dalam membentuk struktur masyarakat.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap isu-isu sosial yang lebih luas seperti kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial telah semakin meningkat. Hal ini juga tercermin dalam perkembangan IPS dalam kurikulum nasional. Mata pelajaran ini mengajarkan siswa untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan, tindakan, dan fenomena sosial yang ada. Siswa juga didorong untuk mencari solusi dan berpartisipasi dalam perubahan sosial yang positif.

Dalam konteks globalisasi dan keterhubungan yang semakin erat, mata pelajaran IPS juga memberikan penekanan pada pemahaman tentang

keragaman budaya, toleransi, dan saling pengertian antar bangsa. Siswa diajarkan untuk memahami perspektif-perspektif yang berbeda dan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang semakin multikultural.

Transformasi IPS dalam kurikulum nasional dari waktu ke waktu juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru-guru IPS didorong untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengajar materi IPS, menggunakan pendekatan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Peningkatan kualitas pengajaran IPS juga melibatkan pengembangan bahan ajar yang lebih menarik, interaktif, dan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, perkembangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam kurikulum nasional dari waktu ke waktu mencerminkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat modern. Dengan mengikuti perubahan-perubahan ini, diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih luas, keterampilan berpikir kritis yang baik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menguraikan perkembangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum nasional pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Peneliti menguraikan dan mendeskripsikan data tersebut melalui pengumpulan pendapat-pendapat para ahli. Maka, dengan mempergunakan pendekatan kualitatif penelitian ini diharapkan bisa memberikan kenyataan secara komprehensif tentang perkembangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum nasional dari waktu ke waktu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *Library Research* dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur-literatur, dan pendapat penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang bisa memperkuat hasil ilmiah dalam penelitian ini. Adapun data dalam penelitian ini berdasarkan pada buku dan jurnal yang relevan untuk diteliti penulis. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dimana dalam penelitian ini berupa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai perkembangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum nasional. Kemudian, data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat argumen penulis dalam menganalisis transformasi mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam kurikulum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan IPS tahun 1945-1965

Pada kurikulum waktu tahun 1945-1964 istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi *social studies* menurut Edgar Wesley (1937) yang menyatakan bahwa *social studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes* (Pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan). Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, *civics*, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah.

Analisis: Kurikulum pada tahun 1945 masih menganut kurikulum Belanda dan belum adanya kurikulum dan mata pelajaran IPS, yang ada pada saat itu

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)

pelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS, yaitu seperti pelajaran sejarah itupun sejarah tentang kemerdekaan Indonesia dan kerajaan-kerajaan di Indonesia karena pada saat itu Indonesia baru merdeka. Kemudian, mata pelajaran geografi yang di pelajari tentang keadaan alam di Indonesia.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1964 dan 1968

Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Dimiyati (1989) menanamkan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut, ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah dan *civics*. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan.

Ketika kurikulum 1968 masih berlaku,

istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) mulai muncul dengan seminar nasional tentang *Civics Education* tahun 1972 di Tawang Mangu Solo. Menurut Winata Putra dalam laporan seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa.

IPS sebagai mata pelajaran pertama sekali masuk ke dalam dunia persekolahan padatahun 1972-1973 yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA. Menurut Winata Putra dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan Kewargaan Negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum SDPPSP tersebut, IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Kurikulum pada tahun 1964 masih sama dengan tahun 1945, tetapi pada kurikulum pada tahun ini sudah ada namanya pendidikan kewarganegaraan ataupun pendidikan kemasyarakatan. Melalui *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)*

pendidikan tersebut agar rakyat Indonesia menjadi warga negara yang baik. Pada tahun 1968 nama IPS juga belum ada. Karena pada saat keadaan Indonesia masih kacau karena terjadinya peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan tokoh-tokoh agama Islam.

Pendidikan IPS pada Kurikulum 1975 dan 1984

Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (disingkat IPS) dalam sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam Kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran "*Content Based Curriculum*". Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Khusus mengenai Kurikulum Sekolah Dasar 1975 tentang ketentuan-ketentuan pokok disebutkan, bahwa sejak tahun 1969 telah terjadi banyak perubahan sebagai akibat dari lajunya program

pembangunan nasional yang antara lain dipengaruhi oleh:

- a. Kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan selama Pelita I yang dimulai pada tahun 1969, telah melahirkan dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
- b. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan didalam Garis-garis Besar Haluan Negara menuntut implementasinya.
- c. Hasil analisa dan penilaian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional.
- d. Inovasi di alam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
- e. Keluhan-keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan, mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku.

f. Adanya beragam pola *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)*

kurikulum SD, seperti kurikulum 1968, Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM), dan Paket Buku.

Sedangkan dalam pembakuan kurikulum Sekolah Dasar juga turut diperhitungkan beberapa hasil pembaharuan sebagai berikut :

- a. Hasil-hasil Proyek Penulisan Buku-buku Pelajaran.
- b. Hasil-hasil Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM).
- c. Konsep Sekolah Pembangunan tentang integrasi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.
- d. Inovasi di bidang metode belajar-mengajar, terutama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).

Sistematika Kurikulum Tahun 1975 dibawah ini juga berlaku bagi semua jenis sekolah. Sistematika ini juga dikutip dari sumber yang sama, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan kurikulum SD 1975 oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur berikut :

- a. Tujuan-tujuan Institusional Sekolah Dasar.

- b. Struktur Program Kurikulum.
- c. Garis-garis Besar Program Pengajaran.
- d. Sistem Penyajian yang menggunakan pendekatan PPSI (Prosedur Penyajian SistemInstruksional).
- e. Sistem penilaian.
- f. Sistem Bimbingan dan Penyuluhan.
- g. Supervisi dan administrasi

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa seseorang belum dapat disebut memaham kurikulum 1975, apabila baru mempelajari tujuan-tujuan institusional saja atau Garis-garis Besar Program Pengajaran, melainkan harus ke semua unsur tersebut. Karena ke semua unsur tersebut akan memberikan warna kurikulum 1975 sebagai sistem pengajaran.

Menurut Winata Putra (2001), Kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam empat profil sebagai berikut:

- a. Pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi "citizenship transmission".
- b. Pendidikan IPS Terpadu *integrated* untuk Sekolah Dasar.
- c. Pendidikan IPS terkonfederasi

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)

untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep *payung* yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.

- d. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Dalam Kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, model Kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurna dari Kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan, artinya kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 1975.

Karena terjadinya pemberontakan pada tahun 1965 yaitu G30 SPKI maka diadakannya seminar nasional tentang *Civis Education* tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Dan IPS pertamakali di gunakan di perguruan tinggi IKIP Bandung. Pada tahun 1975 nama IPS lahir dalam kurikulum yang dikembangkan

oleh pusat kurikulum oleh para ahli-ahli IPS yang salah satunya yaitu Syawal Gultom selaku Rektor Unimed. Pada tahun 1975 mata pelajaran IPS terpadu ditingkat SD, terkonfederasi pada tingkat SMP, dan terpisah-pisah pada tingkat SMA dan SPG. Pada tahun 1984 tidak ada perubahan, hanya saja ada penambahan ilmu sosial yang baru seperti antropologi, ilmu politik, sosiologi di SMA dan untuk tingkat SMA. Sedangkan untuk tingkat SD tidak mengalami perubahan.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994

Pada Kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian, Pendidikan Kewarganegaraan ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang (SD, SMP, SMA). Untuk mata pelajaran IPS, Kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)

pendekatan terpadu "*integrated*" dan berlaku untuk kelas III s/d kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

- b. Mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan artinya masih bersifat terkonfederasi "*correalted*" yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
- c. Mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah "*separated*" atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk Kelas I dan II ekonomi dan geografi, untuk Kelas I dan II sosiologi, tata negara, dan antropologi, untuk kelas III Program IPS.

Khusus untuk IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Materi pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik/pemerintahan sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah local dan sejarah nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan

keterampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para siswa memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Karena IPS untuk SMP dan SMA menganut pendekatan konfederasi dan terpisah-pisah maka tujuannya disesuaikan dengan karakteristik tiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tujuan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA, misalnya, adalah untuk "... menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia".

Mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk "... pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif". Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan "... untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)

ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat”.

Mata pelajaran geografi bertujuan untuk “... memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dan lingkungannya”. Adapun mata pelajaran tata negara bertujuan “...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara RI maupun negara lain”.

Analisis: Kurikulum pada tahun 1994 muncul lah kurikulum yang namanya Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yaitu cara belajara siswa aktif. Kemudian pada pendidikan dasar IPS sudah mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi secara terpadu. Pada tingkat SMP dan SMA di ajarkan secara terpisah oleh guru yang berbeda pada setiap mata pelajaran.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 2004

Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi

ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan Kurikulum 1994 secara tambal sulam yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya kurikulum suplemen ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Pada saat itu pula digulirkan gagasan Kurikulum Berbasis (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro dan kontra tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan bahkan tingkat perguruan tinggi.

Pada tahun 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indoneisa. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SMP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)*

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendahnya.

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi :

- a. Standar isi.
- b. Standar proses.
- c. Standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
- e. Standar sarana dan prasarana.
- f. Standar pengolahan.
- g. Standar pembiayaan.
- h. Standar penilaian Pendidikan

Dalam Pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, dikemukakan pada bagian Penjelasan UU Sisdiknas Pasal 37 bahwa bahan kajian ilmu

pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh para akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang.

Pada saat itu, yakni sebelum lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 muncul sejumlah gagasan yang dilontarkan tentang perlunya perubahan nama sejumlah mata pelajaran sekolah dengan alasan jumlah mata pelajaran sekolah agar lebih ramping. Salah satu target perubahan tersebut adalah mata pelajaran IPS dan PPKn terutama di jenjang SD dan SMP. Nama yang ditawarkan antara lain mata pelajaran Pengetahuan Sosial (PS) yang isi di dalamnya memuat materi pendidikan Kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sementara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihilangkan. Dalam gagasan lain, memunculkan nama Pendidikan Kewarganegaraan dan *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)*

Pengetahuan Sosial (PKPS) yang mengandung muatan sama dengan Pengetahuan Sosial di atas. Pada jenjang SMP dan SMA nama mata pelajaran PPKn diubah menjadi mata pelajaran kewarganegaraan.

Kurikulum pada tahun 2004 masih menganut Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), pada tingkat SD mata pelajaran IPS digabung dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial, sementara pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dihilangkan. Pada tingkat SMP dan SMA nama mata pelajaran PPKn diubah menjadi mata pelajaran kewarganegaraan.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 2006 (KTSP)

Setelah disahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang diakui oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan perlu adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk mata pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Pendidiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan

panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum pada tahun 2006 disebut dengan kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai diterapkannya tematik tetapi hanya sebagian sekolah yang menerapkannya. Tematik mulai di terapkan tingkat SD kelas 1-3, sedangkan kelas 4-6 masih terpadu.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 2013 (K 13)

Kurikulum 2013 disusun dengan maksud antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Pola pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang semula satu arah, menjadi pembelajaran interaktif.

Dalam kurikulum 2013 terdapat empat perubahan penting dibanding kurikulum sebelumnya. Perubahan tersebut meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. Kurikulum 2013, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tetap *Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jenjang SD, SMP, dan SMA)*

diberlakukan, walaupun kurikulum ini sempat direvisi kembali sehingga pemakaian kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah/madrasah. IPS disajikan secara tematik, untuk tingkat SMP IPS disajikan secara terpadu, sedangkan untuk tingkat SMA IPS diberikan sebagai mata pelajaran yang terpisah yang terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi.

Analisis: pada kurikulum tahun 2013 IPS disajikan secara tematik, untuk tingkat SMP IPS disajikan secara terpadu, sedangkan untuk tingkat SMA IPS diberikan sebagai mata pelajaran yang terpisah yang terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Antropologi.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum Merdeka 2020

Kurikulum Merdeka Belajar 2020 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Beberapa alasan mengapa kurikulum tersebut dikeluarkan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidikan: Kurikulum Merdeka Belajar 2020 bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Adopsi teknologi: Kurikulum Merdeka Belajar 2020 dirancang untuk memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam era digital.
3. Responsif terhadap tuntutan dunia kerja: Kurikulum Merdeka Belajar 2020 juga dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap berkompetisi di dunia kerja dengan memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, seperti kreativitas, inovasi, dan keterampilan berbahasa asing.
4. Mempercepat pembangunan SDM: Kurikulum Merdeka Belajar 2020 juga diharapkan dapat mempercepat

pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dengan memperkuat aspek-aspek pendidikan yang terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan global.

5. Merespons pandemi COVID-19: Kurikulum Merdeka Belajar 2020 juga dirancang untuk merespons tantangan pembelajaran jarak jauh yang muncul akibat pandemi COVID-19 dengan memberikan *fleksibilitas* bagi guru dan siswa dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

C. Penutup

Maka, Di tingkat SD mata pelajaran IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang geografi, sejarah, ekonomi, dan pemerintahan. Siswa diharapkan bisa mengenal dan memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan kebudayaan Indonesia serta negara-negara lain. Materi yang diajarkan meliputi pengenalan tempat-tempat penting di Indonesia, sejarah Indonesia, keanekaragaman budaya, tata cara hidup, dan peran keluarga.

Di tingkat SMP, pendidikan IPS lebih

terfokus pada penguatan pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan dunia. Materi yang diajarkan mencakup pengenalan sistem pemerintahan, perkembangan ekonomi, hukum, dan demokrasi. Siswa juga akan mempelajari masalah-masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia.

Di tingkat SMA, mata pelajaran IPS menjadi lebih spesifik dan kompleks. Pendidikan IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik. Siswa akan mempelajari berbagai teori tentang organisasi sosial, proses politik, sistem ekonomi, dan hubungan internasional. Selain itu, siswa juga akan mempelajari cara-cara mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang kompleks di Indonesia dan dunia.

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan IPS di Indonesia didesain untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan dunia. Tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk menghasilkan siswa yang kritis, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan sosial dan lingkungan di masa depan.

Transformasi Social Science Pada Kurikulum Nasional (Studi Historis Mapel IPS Jengjang SD, SMP, dan SMA)

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C. (2012). Konsep dan Makna Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anas, S. (2007). Kebijakan Pendidikan Nasional: Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Panduan Pengembangan Bahan Ajar IPS di SMP. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Djasasudarma, T. F. (2008). Ilmu Sosial, Pendidikan Sosial, dan Pembelajaran Sosial: Suatu Landasan Pemikiran. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Firman, H., & Tilaar, H. A. R. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, S. (2011). Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardapi, D. (2010). Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mukhlis, I. (2014). Pembelajaran IPS: Antara Keterpaduan dan Pembiasaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryana, Y. (2017). Pendidikan IPS: Antara Pendidikan Karakter dan Problem Based Learning. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suparno, P. (2010). Pengantar Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A., & Parta, I. N. (2011). Pengembangan Kurikulum IPS. Yogyakarta: UNY Press.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Ilmu Pendidikan: Teori dan Praktik Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winataputra, U. S. (2011). Pembelajaran IPS yang Menyenangkan dan Menantang. Bandung: PT. Refika Aditama.